

Optimalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Indonesia

Ahmad Maulana
Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Vocational education and vocational training have an important and strategic role in delivering the nation's generation to be able to emerge as development actors, towards a sovereign and competitive nation. Therefore, optimizing the quality and relevance or link and match program is important to be promoted in every vocational education and vocational training unit. However, in its realization there are many obstacles and it is quite difficult to implement, giving rise to skill mismatches and an impact on high unemployment rates. Realizing the important role of vocational education and vocational training, the government has issued a policy through presidential regulation (perpres) Number 68 of 2022 concerning the revitalization of vocational education and vocational training. This research is about educational policy analysis using qualitative research methods with a case study research approach. The results of this research recommend that the government in preparing a road map for revitalization activities needs to consider several aspects as follows: 1) Availability of teaching staff and educational staff; 2) Availability of facilities and infrastructure; 3) Curriculum alignment; 4) Involvement of the business world and the industrial world.

Keywords: Link and match, Revitalization of Vocational Education and Vocational Training, Presidential Regulation Number 68 of 2022.

Abstrak

Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi memiliki peranan penting dan strategis dalam mengantarkan generasi bangsa untuk mampu tampil sebagai aktor pembangunan, menuju bangsa yang berdaulat dan berdaya saing. Oleh karena itu optimalisasi mutu dan relevansi atau program *link and match* penting untuk digalakan pada setiap satuan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Namun dalam realisasinya banyak terkendala dan cukup sulit diimplementasikan sehingga menimbulkan *skill mismatch*, dan berdampak pada tingginya angka pengangguran. Menyadari pentingnya peranan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan presiden (perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Penelitian ini tentang analisis kebijakan pendidikan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus (case study). Hasil dari penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dalam penyusunan peta jalan (road map) keajibakan revitalisasi perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut : 1) Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Ketersediaan sarana dan prasarana; 3) Penyelarasan kurikulum; 4) Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri.

Kata Kunci : Link and match, Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks, dan telah menjadi isu sentral di kalangan masyarakat. Tidak hanya di dalam negeri, pemerhati pendidikan Internasional juga menaruh perhatian besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah the Centre for Education Economics (CEE,2018) yang dikembangkan Cambridge Assesment, London, dalam sebuah jurnalnya menilai bahwa program pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung sama, yang berbeda hanyalah peninggakan anggaran yang tidak berdampak pada kemajuan (*business a usual with more money/ BAUWMM*). Penilaian CEE juga didukung dengan publikasi *World Population Review* tahun 2021 yang menempatkan pendidikan di Indonesia berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara, dan dibawah Thailand yang masuk peringkat 46, dan Malaysia peringkat 38.

Berdasarkan olahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022, jumlah penganggur terbuka lulusan vokasi tahun 2022 sebesar 1,8 juta orang atau 22 persen dari total penganggur. Dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah terbanyak disumbang lulusan SMK jika dibandingkan lulusan diploma satu (D-1), diploma dua (D-2), dan diploma tiga (D-3) pada tahun 2022 sebanyak 4,59%. Selanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, jumlah pengangguran lulusan SMK tertinggi berasal dari bidang keahlian teknologi dan rekayasa (13,76%) serta bisnis manajemen (12,25%). Sedangkan yang terendah berasal dari bidang keahlian energi dan pertambangan (6,49%) serta seni dan industri kreatif (7,23%).

Kebijakan pendidikan terkait dengan optimalisasi peranan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi telah ditempuh oleh pemerintah baik melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Lahirnya perpres ini sangat penting dan diharapkan mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah konkrit pendidikan dan peleatihan vokasi, terlebih Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi.

Bonus demografi adalah situasi dimana populasi penduduk didominasi oleh usia produktif, inilah yang terjadi saat ini di Indonesia. Sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan BPS sebagaimana dilansir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, menunjukkan bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok generasi Z dan millennial, dimana penduduk generasi Z (berusia 8-23 tahun) sebanyak 75,49 juta atau 27,94%, penduduk milenial (berusia 24-39 tahun) mencapai 69,90 juta (25,87%), (kominfo.go.id). Jika bonus demografi ini mampu dikelola dengan baik tentu dapat mendorong Indonesia menuju negara maju, dan sebaliknya akan memicu peningkatan angka pengangguran yang tinggi dan ini menjadi beban bagi negara jika gagal mengelolanya. Untuk memfokuskan pelatihan menjadi pembelajaran yang efektif, mensyaratkan organisasi untuk mampu memperhatikan dua unsur penting yaitu karakteristik peserta pelatihan dan dukungan lingkungan organisasi. Ekspektasi dan harapan dua unsur tersebut perlu dipertemukan agar proses pelatihan berjalan sempurna (Adi Suryanto, 2018). Karena pentingnya pelatihan dapat menghasilkan manfaat bagi organisasi, fleksibilitas serta efisiensi. Pengetahuan yang didapatkan dalam proses pelatihan dalam hal ini akan berpengaruh pada perubahan perilaku serta dampak organisasi yang lebih luas (Suryanto et al., 2023).

Di Indonesia, upaya peningkatan peran Pendidikan Vokasi dalam memasok SDM berkualitas bagi kebutuhan sektor kerja dan industri menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, diantaranya adalah kualitas layanan pendidikan yang belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kurikulum yang belum sesuai dengan dunia industri, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi (Renstra Dirjen Vokasi, 2020). Dengan adanya pelatihan hal ini dapat mengatasi tantangan yang ada, karena pelatihan mempunyai fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan (Karunia et al., 2023). Pemasokan SDM yang berkualitas mengalami berbagai tantangan. Namun, untuk menciptakan pendidikan vokasi, sumber daya manusia yang berkualitas serta sumber daya keuangan sangat penting karena dapat membantu pemerintah dalam mengelola pemerintahan yang baik (Karunia et al., 2023). Kurikulum dan capaian pembelajaran juga belum mendorong penguasaan soft-skills yang dibutuhkan dalam bekerja, seperti penguasaan bahasa asing, kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim. Masih terdapat mismatch antara kompetensi lulusan vokasi serta kualitas lulusan dengan kebutuhan DUDI (Slamet PH, Kerstin Littke, 2018). Perkembangan teknologi semakin pesat, transformasi digital dalam berbagai bidang terus dilakukan sebagai

upaya untuk meningkatkan pelayanan. Maka dari itu, evolusi pelatihan dan praktik pendidikan di dunia semakin ditentukan oleh kemajuan teknologi serta konektivitas digital (Rahayu et al., 2022).

KAJIAN LITERATUR

Pendidikan Vokasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan "pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam dalam bidang tertentu". Sementara itu Wenrich & Wenrich (1974) menyatakan pendidikan vokasi adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang untuk mampu bekerja dan meniti karir dalam bidang pekerjaannya. Sedangkan Wenrich and Gollaway (1988) mengemukakan bahwa "vocational education might be defined as specialized education that prepares the learner for entrance into a particular occupation or family occupation or to upgrade employed workers".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus (case study). Penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berangkat dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013). Pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan.

Menurut Faisol (1999) Studi kasus yaitu penelitian yang penelaahannya kepada suatu yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang diteliti, yakni kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dalam rangka mengoptimalkan program link and match dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data yang diambil bersumber dari hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Penyelenggaraan dan pengembangan dalam konteks revitalisasi berorientasikan kebutuhan (*demand-driven*) yang diselenggarakan melalui kolaborasi dan integrasi Kementerian/Lembaga, dan para *stackholder* menuju terciptanya ekosistem tata kelola pendidikan vokasi & pelatihan vokasi yang harmonis, terintegrasi, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Kementerian/lembaga dan *stackholder* yang terlibat dalam kolaborasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi adalah Kemdikbudristek, Kemnaker, Kementerian/ Lembaga terkait, PEMDA, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha, Asosiasi industri, Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), BNSP, Lembaga Akreditasi (BAN-PT, LAM-PT, BAN-PAUD-PNF, LA-LKP), Lembaga Sertifikasi Profesi/Kompetensi (LSP, LSK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi Vokasi, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Kursus Pelatihan (LKP). Kolaborasi penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian mutu dan relevansi kompetensi (*link and match*).

Pembinaan dan pengembangan serta dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN menjadi kewenangan Kemdikbudristek, Kemnaker, dan Kementerian terkait lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan vokasi. Lembaga Pendidikan Vokasi mencakup perguruan tinggi vokasi, dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dibawah binaan Kemdikbudristek. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) dibawah binaan Kemnaker, selanjutnya Kementerian terkait lainnya memberikan pembinaan sesuai bidang/kewenangannya, misal Pelatihan Vokasi bidang pertanian maka pembinaannya oleh Kementerian pertanian.

Selanjutnya sistem penjaminan mutu dilakukan melalui proses akreditasi oleh lembaga akreditasi untuk penjaminan mutu kelembagaan/institusi. Sedangkan penjaminan mutu lulusan dilakukan melalui proses uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Profesi yang berlisensi BNSP atau berlisensi Internasional. Proses pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan pada Lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi atau dikenal dengan *Competency Based Training* (CBT) mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), atau Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI).

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKK adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan. SKKI adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.

Optimalisasi *Link and Match* Melalui Relevansi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui Perpres No.68 Tahun 2022 lingkungannya lebih luas dari pada kebijakan revitalisasi sebelumnya, tidak terbatas sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi vokasi, dan lembaga pelatihan kerja juga memiliki peranan penting dalam revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam hal ini kita perlu belajar banyak dari pengalaman sebelumnya dengan tidak mengulangi kesalahan, oleh karena itu dalam menyusun *road map* para pengambil kebijakan harus mampu memahami dinamika perubahan lingkungan strategis, baik pada lingkungan internal maupun eksternal. faktor-faktor pendukung dan penghambat penting untuk diidentifikasi secara cermat. Hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan *road map* revitalisasi adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Guru, dosen, dan tenaga kependidikan merupakan salah satu instrumen inti dalam menentukan keberhasilan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Oleh karena itu ketersediaan guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkompeten wajib di penuhi oleh setiap satuan lembaga pendidikan dan pelatihan. Dalam Perpres No. 68 tahun 2022 sebagai penanggung jawab atau yang menjamin ketersediaan guru, dosen, dan tenaga kependidikan adalah Pemerintah Daerah (PEMDA). Keterbatasan guru vokasi baik secara kualitas maupun kuantitas dikemukakan oleh Kemdikbudristek bahwa saat ini terdapat kekurangan 90.072 guru di SMK negeri, baik guru umum maupun guru kejuruan yang mampu mata pelajaran produktif, dan itu akan terus bertambah seiring usia pensiun guru. Kemdikbudristek memperkirakan hingga 2023 kekurangan guru umum di SMK mencapai 56.598 orang dan kekurangan guru kejuruan bisa mencapai 43.746 orang (kompas.id).

2. Ketersediaan Sarana & Prasarana

Setiap satuan pendidikan & pelatihan vokasi berkewajiban memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana, terutama sarana praktikum atau praktek di sekolah. Penentuan kriteria minimal standar sarpras ini disesuaikan dengan kebutuhan proses kegiatan pelatihan dalam rangka pemenuhan capaian kompetensi lulusan. Dasar penetapan standar sarpras pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio jumlah siswa dengan jumlah peralatan, serta frekuensi atau waktu penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran.

Ketersediaan Sarana & Prasarana juga harus menyesuaikan dengan kemajuan IPTEK dan di *upgrade* secara berkala dengan melakukan pemutahiran laboratorium dan bengkel-bengkel inovasi, mengembangkan ruang-ruang inovasi, bootcamp vokasi, laboratorium, bengkel produksi, dan bentuk-bentuk lainnya diseluruh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Standarisasi ketersediaan sarana dan prasarana sangat menentukan pencapaian kompetensi lulusan. Oleh karena itu perlu adanya penilaian yang ketat, baik dalam proses akreditasi lembaga atau akreditasi program studi, maupun dalam proses perijinan sekolah dan atau program studi baru.

3. Penyelarasan Kurikulum

Pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan adalah pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi atau *Competency Based Training* (CBT), dengan kurikulum pilihan yakni kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), atau Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI). SKKNI dikembangkan oleh KADIN bersama-sama Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Industri, yang selanjutnya digunakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai instrumen asesmen dalam uji kompetensi para lulusan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang berlisensi BNSP. SKKNI di jadikan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan & pelatihan vokasi berbasis kompetensi (CBT) pada lembaga secara umum.

Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) disusun dan dikembangkan lembaga bersama DUDIKA, dan di implementasikan pada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem ganda (PSG). Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI) disusun dan dikembangkan bersama DUDI perusahaan multi nasional dan digunakan secara internasional, SKKI di implementasikan pada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sistem ganda (PSG) dengan DUDI perusahaan multi nasional. Pengembangan Kecakapan peserta didik disamping SKKNI, SKKK, dan SKKI, juga penting mempertimbangkan tuntutan kecakapan di era revolusi industri 4.0 sebagaimana dikemukakan diatas.

Tentu kita tidak menginginkan kompetensi yang saat ini dikembangkan, merupakan kompetensi yang tidak dibutuhkan lagi di masa depan. Hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah mengantarkan peserta didik untuk mampu belajar dan berlatih mandiri mengembangkan kompetensinya, serta tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan IPTEK. Sehingga pada waktunya mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dan kemajuan IPTEK.

4. Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan keniscayaan, tanpa keterlibatan DUDIKA program *link and match* akan sulit direalisasikan. Keterlibatan DUDIKA diperlukan dalam menyelenggarakan On the Job Training (OJT), Praktek Kerja Industri (Prakerin), Magang mahasiswa, Project Based Learning (magang guru/dosen), Teaching factory, Penyelarasan kurikulum, dan kegiatan penunjang lainnya. Dalam realisasinya program *link and match* dengan melibatkan DUDIKA bukanlah pekerjaan mudah.

Setiap satuan pendidikan dan daerah memiliki kompleksitas masalah dan tantangan yang berbeda. Dinamika mewujudkan sinergi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan DUDIKA merupakan sistem yang relatif rumit, karena konsep yang ditawarkan tidak selalu kompatibel satu sama lainnya, serta keduanya juga memiliki kultur yang tidak mudah disatukan. Kurang responnya DUDIKA dalam menjalin kemitraan dengan pendidikan dan pelatihan vokasi salah satunya adalah cara pandang mereka terhadap program kemitraan tersebut, yang dinilai sebagai kegiatan sosial/CSR (corporate social responsibility) yang tidak berdampak pada produktivitas kerja.

Dengan pandangan seperti ini sebagian DUDIKA tidak menganggap penting dan tidak tertarik untuk menjalin kemitraan dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, sekalipun pemerintah telah memberikan fasilitas pengurangan pajak super (*super tax deduction*). Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika DUDIKA menilai bahwa kemitraan dengan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah sebuah investasi, bukan kegiatan sosial/CSR. Mengubah cara pandang tersebut bukanlah pekerjaan mudah, karena akan sulit jika penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi secara langsung memberikan kuliah/ceramah kepada para manajer di DUDIKA.

Disinilah Kelompok Kerja Tim Koordinator Revitalisasi Daerah (Pokja-TKRD) mengambil peranan dalam menjembatani terjalinnya kemitraan DUDIKA dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Sebagaimana penyelenggaraan pendidikan vokasi di Luar negeri khususnya di Jerman, pemerintah hadir melakukan pendampingan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan dalam proses negosiasi/sosialisasi menjalin kemitraan dengan DUDIKA. Peranan Pokja-TKRD diharapkan tidak terbatas dalam perumusan SKKNI, juga diperlukan dalam merealisasikan kemitraan pendidikan dan pelatihan vokasi.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/dukungan-vokasi-ciptakan-peluang-kualitas-sdm-indonesia-mumpuni>

<https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/revitalisasi-pendidikan-vokasi-di-indonesia>

Intan, R. (2022). Implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan tinggi vokasi program diploma iii. *Pengabdian Vokasi Universitas Diponegoro*.

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/02/mengatasi-pengangguran-dari-pendidikan-vokasi>

<https://lpm.amikompuwokerto.ac.id/standar-sarana-danprasarana-pembelajaran-untuk-pendidikan-vokasi/>

- Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen). 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. "Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2020-2024." *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* 1–129.
- Kemdikbud. 2018. "Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah." *JDIH Kemendikbud* 2025:1–527.
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). The Importance of Good Governance in the Government Organization. *HighTech and Innovation Journal*, 4(1), 75–89. <https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-01-06>
- Karunia, R. L., Darmawansyah, D., Prasetyo, J. H., Triyadi, T., & Ariawan, J. (2023). The effectiveness of career development in mediating the influence of the working environment and training towards the performance of employee. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 17(2), 202–210. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i2.1098>
- Ivan Putranto. Pengembangan Model Kerjasama Link and Match untuk Meningkatkan Kesiapan Kerja Bagi Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Akuntansi di Kota Semarang. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 69 – 83.
- Milandah Maulina, Nono Hery Yoenanto. Optimalisasi link and match sebagai upaya relevansi SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Volume 10, No.1, April 2022 (28-37). 10(1), 28-37
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- Rahayu, N., Suryanto, A., Andriansyah, A., & Irawati, E. (2022). Measuring the Effectiveness of State Civil Apparatus Training. *Research Horizon*, 2(5), 543–554.
- Strategi Implementasi Revitalisasi SMK. 10 langkah revitalisasi SMK. Buku Serial Revitalisasi SMK. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017
- Suryanto, A. (2018). Strategi Peningkatan efektifitas pelatihan kepemimpinan: telaah teoretis dan empiris. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 69-86. <https://doi.org/10.24258/jba.v14i1.337>
- Suryanto, A., Nurdin, N., Irawati, E., & Andriansyah, A. (2023). Digital transformation in enhancing knowledge acquisition of public sector employees. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 117-124. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.11.011>

